

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

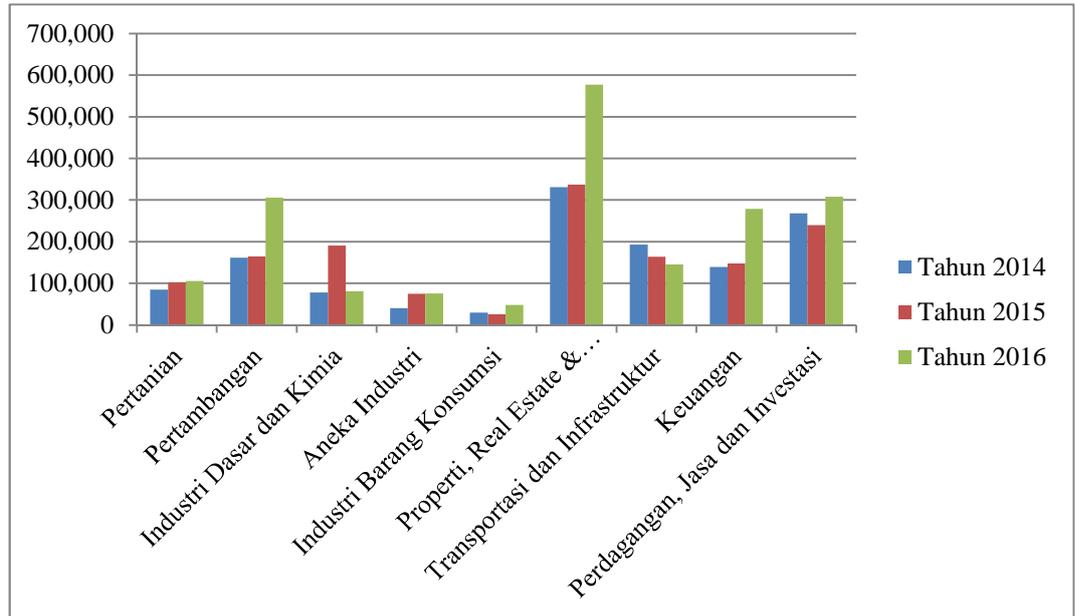
Laporan keuangan yang disajikan perusahaan banyak dimanfaatkan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan. Sehingga informasi yang terdapat dalam laporan keuangan merupakan informasi yang sangat penting bagi para penggunanya. Salah satu pengguna yang sangat bergantung pada laporan keuangan adalah investor/pemilik saham. Dasar analisis *return* yang akan diperoleh dari *capital gain* maupun dari deviden dapat diperoleh dari laporan keuangan. Namun karena adanya pemisahan antara agen dan prinsipal menyebabkan adanya perbedaan kualitas informasi yang diperoleh. Agen yang menjadi manajemen perusahaan memiliki informasi yang lebih baik terkait operasional perusahaan, sementara prinsipal yang berada di luar operasional perusahaan memiliki keterbatasan atas informasi tersebut, sehingga muncullah *information gap* atau asimetri informasi. Menurut Jensen & Meckling (1976) asimetri informasi merupakan kondisi dimana agen dan prinsipal berupaya untuk memaksimalkan utilitasnya, maka terdapat alasan yang kuat bahwa agen tidak akan selalu bertindak yang terbaik untuk kepentingan prinsipal. Scott (2009, hlm. 13) menambahkan bahwa manajer atau pihak internal lainnya dapat melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kontrak antara agen dan prinsipal atau tindakan yang melanggar etika diluar sepengetahuan pemegang saham.

Pemisahan fungsi prinsipal dan agen seringkali menjadi isu kesenjangan informasi keagenan, prinsipal yang merupakan pemilik/investor tentunya mengharapkan dapat memperoleh pendapatan (deviden) dan kenaikan harga (*gain*) dari investasi yang dilakukannya, namun ada kalanya harapan tersebut tidak dapat diperoleh dikarenakan kebijakan manajemen/agen yang tidak dapat dikendalikan atau diintervensi. Hal tersebut terlihat dari kasus skandal manipulasi laporan keuangan perusahaan elektronik yang berasal dari Jepang, Toshiba. Kasus tersebut mulai terungkap sejak bulan April 2015 lalu, saham Toshiba telah turun sekitar 20% - 40% akibat adanya isu-isu skandal akuntansi tersebut.

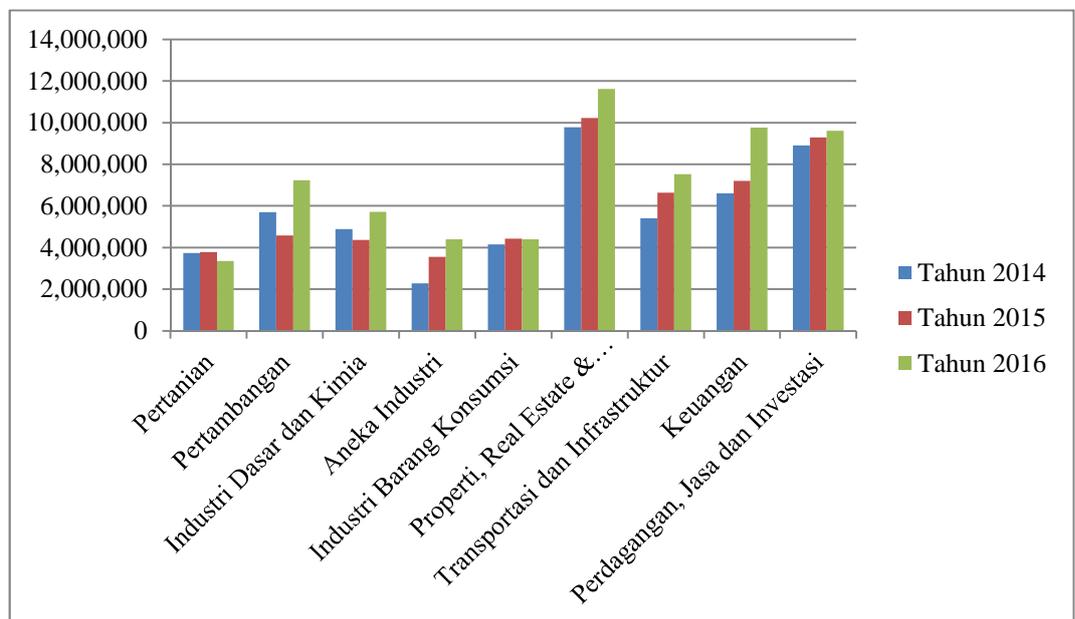
Berawal dari laporan seorang akuntan independen dan pengacara, mereka menduga laba operasional Toshiba telah dibesar-besarkan sebesar 151,8 miliar yen atau sekitar 1,22 miliar dolar amerika selama periode 5 tahun. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, Toshiba membukukan kerugian tahunan sebesar 318 juta dolar amerika atau sekitar 37,8 miliar yen, pada tahun fiskal yang berakhir Maret 2015. Hasil tersebut berbanding terbalik dari proyeksi sebelumnya bahwa perusahaan membukukan laba tahunan sebesar 120 miliar yen. Tim penyidik independen menemukan bukti bahwa Tanaka, selaku *Chief Executive Officer* (CEO) Toshiba Corp mengetahui bahwa perusahaan memanipulasi laporan keuangan selama beberapa tahun terakhir. (www.cnnindonesia.com, www.sindonews.com).

Di Indonesia juga terdapat kasus yang menunjukkan adanya asimetri informasi diantara manajemen dan investor, yaitu kasus suap yang terjadi pada PT Agung Podomoro Land. Suap yang dilakukan oleh direktur PT Agung Podomoro Land kepada M Sanusi selaku anggota DPRD DKI Jakarta, dana suap senilai 2 miliar rupiah bertujuan untuk mempengaruhi Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) terkait rencana tata ruang kawasan strategis pantai utara Jakarta tahun 2016. Akibat adanya kasus tersebut membuat harga saham PT Agung Podomoro Land turun sekitar 10% tidak hanya penurunan saham hal tersebut juga membuat penurunan volume perdagangan saham sekitar 37.93% dari tahun sebelumnya. Kasus suap tersebut mengindikasikan adanya asimetri informasi, yaitu kondisi dimana tindakan yang dilakukan manajer tidak sepenuhnya diketahui oleh pemegang saham dan juga dana perusahaan yang digunakan untuk suap yang tidak diketahui pemilik saham karena tidak tercermin pada laporan keuangan. Hal ini dikarenakan adanya penyalahgunaan dana perusahaan dimana dana yang seharusnya digunakan untuk operasi perusahaan digunakan untuk kepentingan lain yang juga akan berpengaruh terhadap laporan keuangan dimana akan ada alokasi khusus dalam laporan keuangan untuk mengganti dana yang digunakan untuk suap tersebut. Sehingga terdapat kemungkinan laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan tidak akan sesuai dengan keadaan sesungguhnya (www.kompas.com).

Grafik *volume* dan frekuensi perdagangan saham 2014-2016



Gambar 1.1 *volume* perdagangan saham tahun 2014-2016 (dalam ribuan)



Gambar 1.2 frekuensi perdagangan saham 2014-2016

Sumber : IDX (data diolah)

Pada tahun 2017 Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan adanya kenaikan investor yang aktif di pasar modal saat ini mencapai 97.000 investor, jumlah ini naik 25% dari tahun 2016 yang rata-rata hanya mencapai 78.000 investor aktif (*okezone.com*). Kenaikan investor aktif ini tentu saja akan meningkatkan jumlah transaksi yang ada dibursa saham. Pada grafik diatas menunjukkan *volume* dan frekuensi perdagangan saham seluruh sektor industri, dimana dari tahun 2014 sampai 2016, grafik di atas menunjukkan sektor *property, real estate & building construction* mendominasi frekuensi dan *volume* perdagangan saham dari tahun 2014 hingga 2016. Frensidy (2008 dalam Silviyani, 2014) mengungkapkan bahwa semakin besar *volume*, nilai dan frekuensi dari sebuah saham maka akan semakin tinggi likuiditas saham tersebut. Menurut Mulyana (2011 dalam Silviyani, 2014) semakin likuid suatu saham, maka semakin tinggi minat investor terhadap saham tersebut. Dari tabel diatas kita dapat menyimpulkan saham dari sektor *property, real estate & building construction* merupakan saham yang cukup diminati oleh investor maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian disektor ini.

Dengan adanya peningkatan jumlah investor maka pengguna laporan keuanganpun akan semakin banyak. Laporan keuangan digunakan investor untuk menganalisa kinerja perusahaan sebagai dasar berinvestasi. Dengan semakin banyaknya pengguna laporan keuangan, maka sudah sepantasnya laporan keuangan yang disajikan oleh emiten harus semakin berkualitas, sehingga informasi yang diperoleh investor menjadi seimbang dengan informasi yang dimiliki oleh manajemen/emiten. Upaya meningkatkan kualitas informasi guna menekan asimetri informasi yaitu dengan meningkatkan transparansi laporan keuangan. Cara yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas informasi yaitu dengan dilibatkannya pihak ketiga yang independen untuk melihat kewajaran laporan keuangan. Pihak ketiga tersebut merupakan auditor yang bekerja pada sebuah kantor jasa Kantor Akuntan Publik. Seorang auditor harus memiliki kompetensi dan independensi, karena kedua hal tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk mengurangi adanya asimetri informasi dalam laporan keuangan. Dalam beberapa kasus yang sebelumnya terjadi independensi seorang auditor dapat terpengaruh karena kedekatan antara auditor dengan klien. Seperti

kasus Enron dan Arthur Andersen dimana hal tersebut membuat publik kehilangan kepercayaan terhadap auditor. Menurut Fitriany (2011 dalam Primadita 2012) kompetensi seorang auditor dapat diukur melalui tenure audit (jangka waktu penugasan), rotasi auditor, spesialisasi, *workload* dan PPL (pendidikan profesional lanjutan), sedangkan independensi dapat diukur dari *tenure* dan rotasi.

Untuk meminimalisir seorang auditor kehilangan independensi maka dibuatlah aturan mengenai rotasi audit, peraturan terbaru ada pada Peraturan Pemerintah no. 20 Tahun 2015 yang membatasi jangka waktu pemberian jasa oleh Akuntan Publik yaitu 5 tahun buku berturut-turut dan untuk Kantor Akuntan Publik tidak diberikan batasan dalam pemberian jasa audit. Pembatasan ini lebih panjang dibandingkan dengan peraturan yang berlaku sebelumnya yaitu PMK No. 17/PMK.01/2008 dimana Akuntan Publik hanya boleh memberikan jasa audit selama 3 tahun buku berturut-turut dan Kantor Akuntan Publik selama 6 tahun buku berturut-turut. Pembatasan tersebut menimbulkan pro dan kontra, bagi sebagian pihak berpendapat bahwa semakin panjang tenur maka akan mengurangi tingkat independensi dan objektivitas auditor. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Hakim dan Omri (2010) dimana mereka menemukan tenur yang panjang dari auditor membuat naiknya asimetri informasi dalam perusahaan. Dao et. al. (2008) mengungkapkan untuk tenur dalam jangka waktu yang lama dapat mengerahkan kedekatan antara kantor akuntan publik dan juga manajemen perusahaan, hal itu membuat seorang akuntan publik sulit untuk independen.

Namun pendapat berbeda diungkapkan oleh Gul et. al. (2009) dimana kualitas audit pada awal perikatan akan sangat minim, dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang klien sehingga meningkatkan ketergantungan auditor terhadap estimasi yang dibuat oleh klien. karena itu auditor membutuhkan waktu yang lebih lama agar dapat memahami bisnis klien, sehingga semakin lama tenur audit akan semakin baik kualitas audit yang dihasilkan auditor. Pemahaman karakteristik audit klien bersifat akumulatif dan dapat bertambah seiring dengan bertambahnya tenure audit, hal ini disebabkan karena auditor melakukan pembelajaran pada tahun-tahun berikutnya (DeAngelo, 1981). Menurut peneliti adanya kebijakan rotasi terbaru ini menjadi hal menarik karena pada penelitian

sebelumnya dimana panjang dan pendeknya tenur audit masih menjadi perdebatan, namun dalam aturan yang berlaku sekarang dibuat dengan jangka waktu tenur yang lebih lama yaitu 5 tahun buku yang sebelumnya 3 tahun buku sehingga peneliti tertarik untuk meneliti keefektifan dari aturan yang berlaku sekarang.

Di Indonesia ini sendiri pernah terjadi suatu kasus berkaitan dengan akuntan Publik yang melebihi batas rotasi audit, yaitu kasus dari Akuntan Publik Djoko Sutarjo dari Kantor Akuntan Publik Hertanto, Djoko, Ika & Sutrisno yang dibekukan oleh Menteri Keuangan terhitung sejak Januari 2007. Pada tahun 2005 di dalam laporan keuangan perusahaan Myoh Technology yang bergerak dibidang *software* dan *information technology* yang diaudit oleh Djoko terdapat kesalahan dalam penjumlahan dan penyajian arus kas. Selain itu, Djoko juga melanggar pembatasan penugasan audit, dimana Djoko telah mengaudit perusahaan Myoh Technology empat tahun berturut-turut dari tahun 2002 hingga 2005. (www.hukumonline.com). Dimana aturan yang berlaku pada saat itu yaitu Keputusan Menteri Keuangan No.423/KMK/.06/2002, yang berisi pemberian jasa audit atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) paling lama 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Sehingga dari aturan yang berlaku pada saat itu kita bisa mengetahui kalau Akuntan Publik Djoko melanggar tentang rotasi audit dimana dia mengaudit laporan keuangan secara 4 tahun buku berturut-turut sedangkan aturan yang berlaku pada saat itu hanya membolehkan seorang Akuntan Publik untuk mengaudit hanya 3 tahun buku berturut-turut.

Adanya kepemilikan saham investor institusional menjadi hal penting karena mayoritas saham yang diperdagangkan di bursa mayoritas dikuasai oleh investor institusional, aktifitas yang dilakukan oleh investor institusi juga menjadi tolak ukur dalam aktifitas yang akan dilakukan oleh investor ritel/individu. Hal ini diperjelas dari pernyataan direktur utama Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menjabat pada tahun 2015, Ito Warsito yang menyatakan pada akhir maret 2015 presentase kepemilikan saham investor institusional di BEI masih cukup dominan sebesar 73,14 persen, sehingga aktifitas transaksi investor institusi telah menjadi

tolak ukur bagi investor ritel dalam bertransaksi. (www.cnnindonesia.com). Perusahaan-perusahaan yang baru melakukan penawaran umum saham perdana (IPO) juga lebih mengistimewakan investor institusi dari pada investor ritel dimana terdapat penjatahan pasti (*fixed allotment*) dengan prosentase yang cukup besar diberikan kepada investor institusi, sedangkan untuk masyarakat biasa melalui mekanisme *pooling*. Samsul Hidayat direktur BEI mengungkapkan saat ini mekanisme *pooling* hanya sekitar 2-3% sementara untuk sisanya 97-98% melalui *fixed allotment* yang dikuasai oleh investor institusi. (<http://emitennews.com/>). Menurut Jensen, Solberg, dan Zorn (1992 dalam Pratiwi, 2015) mengungkapkan dalam konflik kepentingan antara manajer dan investor dapat dikurangi dengan meningkatkan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional, dalam hal ini sebagai *monitoring agent*. Peningkatan struktur kepemilikan juga dapat menjadi pengawas bagi manajemen yang akan berdampak bagi mengurangi motivasi manajer untuk melakukan kecurangan sehingga asimetri informasi dapat berkurang (Pratiwi, 2015). Susanto (1992 dalam Purwanti 2013) menambahkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih besar akan memberikan pengungkapan yang lebih banyak dengan alasan untuk memasarkan sahamnya. Dengan lebih banyaknya pengungkapan yang dilakukan perusahaan maka akan membuat asimetri informasi semakin berkurang karena meningkatnya transparansi dalam perusahaan.

Asimetri informasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, asimetri informasi sendiri merupakan salah satu bentuk *agency conflict*, dimana *agency conflict* itu merupakan masalah yang timbul dari hubungan keagenan antara dua pihak atau lebih, hubungan keagenan mengakibatkan adanya pemisahan fungsi satu pihak menjadi prinsipal/investor sebagai pemberi wewenang satu pihak lagi menjadi agen/manajemen selaku penerima wewenang, seperti yang diketahui asimetri informasi adalah keadaan dimana informasi yang dimiliki oleh satu pihak lebih banyak dari pihak yang lain, pihak agen selaku pengelola perusahaan tentunya memiliki informasi yang lebih banyak daripada pihak prinsipal, sehingga diperlukan transparansi antara pihak yang satu dengan yang lain. Untuk meningkatkan transparansi diperlukan satu pihak lagi yang independen dan berkompoten dalam memeriksa laporan yang dikeluarkan oleh pihak agen, pihak

ini adalah auditor eksternal. Melihat teori diatas asimetri informasi ini dapat dipengaruhi dari bagaimana kondisi pihak yang mempengaruhi transparansi informasi dalam hubungan keagenan tersebut, secara sederhana ada tiga pihak yang dapat mempengaruhi asimetri informasi yaitu, prinsipal, agen dan auditor eksternal. Dari sisi prinsipal/investor dapat dilihat dari struktur kepemilikan dalam perusahaan, yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional hal ini seperti yang diteliti oleh Pratiwi, 2015 dan Purwanti, 2013). Kemudian dari agen atau pengelola perusahaan dapat dilihat dari *corporate goverance*, kualitas komite audit, kualitas pelaporan, ukuran perusahaan, hal ini seperti yang diteliti oleh Wisadha, 2015, Purwanti, 2013 dan Kusuma 2014). Dari sisi auditor eksternal yang dapat mempengaruhi independensi dan kompetensi auditor sendiri diantaranya ada audit tenur, auditor spesialis, ukuran KAP seperti penelitian yang dilakukan oleh Hakim 2010, Wisada 2015 dan Primadita 2012. Untuk penelitian ini peneliti memilih menggunakan audit tenur dan kepemilikan institusional dikarenakan adanya adanya aturan baru terkait dengan tenur yang terdapat dalam PP No. 20 tahun 2015 dimana tidak terdapat batasan dalam tenur KAP dengan sebuah perusahaan dan juga tidak konsistennya hasil penelitian sebelumnya sehingga peneliti ingin mengulang kembali penelitian ini.

Studi tentang asimetri informasi telah dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri seperti penelitian yang dilakukan oleh Alexander Aji Suseno Wakum dan I Gede Suparta Wisadha (2015) yang meneliti pengaruh audit tenur pada asimetri informasi dengan komite audit sebagai Variabel Moderasi (studi pada perusahaan perbankan di BEI tahun 2009-2011), menemukan bahwa audit tenur berpengaruh negatif terhadap asimetri informasi dan komite audit mampu memoderasi pengaruh audit tenur terhadap asimetri informasi. Titik Purwanti (2013) yang meneliti pengaruh mekanisme *corporate goverance* pada asimetri informasi (studi pada perusahaan dengan peringkat 10 besar di *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) 2004-2007), menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap asimetri informasi sedangkan kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen dan ukuran dewan komisaris tidak terdapat pengaruh pada asimetri informasi. Indria Primadita dan Fitriany (2012) yang meneliti pengaruh audit tenur dan auditor

spesialis pada asimetri informasi (studi pada perusahaan manufaktur di BEI 2009-2011), menemukan audit tenur memiliki hubungan kuadrat pada asimetri informasi sedangkan auditor spesialis berpengaruh negatif terhadap asimetri informasi. Ana Pratiwi, Nurkholis, dan Abdul Ghafar (2015) yang meneliti pengaruh *corporate governance* dan struktur kepemilikan pada asimetri informasi (studi pada perusahaan yang memiliki skor dari *Asean Corporate Governance Scorecard* di 2010-2011), hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate governance* dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada asimetri informasi sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap asimetri informasi. Moahmoud Mousavi Shiri, Mahdi Salehi, dan Ali Radbon (2016) meneliti pengaruh struktur kepemilikan dan kualitas pengungkapan terhadap asimetri informasi (studi pada perusahaan yang terdaftar di *Tehran Stock Exchange* (TSE) 2007-2014), menemukan hasil berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2015) dan Purwanti (2013) dimana kepemilikan institusional berpengaruh positif pada asimetri informasi dan kualitas pengungkapan berpengaruh negative terhadap asimetri informasi. Mohamed Ali Omri dan Faten Hakim (2010) meneliti kualitas auditor eksternal pada asimetri informasi (studi pada perusahaan yang terdaftar di *Tunisian Capital Market* tahun 2000-2006), hasil penelitian menunjukkan audit tenur berpengaruh positif terhadap asimetri informasi, sedangkan auditor BIG 4 dan auditor spesialis berpengaruh negatif terhadap asimetri informasi. Namun penelitian yang dilakukan oleh Primadita (2012), Wakum dan Wisadha (2015) terkait audit tenur menemukan hasil berbeda dimana audit tenur berpengaruh negatif terhadap asimetri informasi. Tiffany Kusuma, Restu Agusti dan Al Azhar L (2014) meneliti tentang pengaruh kualitas pelaporan keuangan, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap asimetri informasi (studi pada perusahaan perbankan di BEI tahun 2008-2012), yang menemukan kualitas pelaporan keuangan dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap asimetri informasi sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap asimetri informasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya peneliti tertarik untuk meneliti kembali mengenai asimetri informasi karena hasil penelitian sebelumnya mengenai asimetri informasi masih belum konsisten walau

menggunakan variabel yang sama. Maka dari itu, peneliti bermaksud meneliti kembali variabel audit tenur dan kepemilikan instusional pada asimetri informasi, dengan judul **“Pengaruh Audit Tenur dan Kepemilikan Institusional terhadap Asimetri Informasi”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti menyimpulkan masalah sebagai berikut :

1. Apakah audit tenur kantor akuntan publik berpengaruh terhadap asimetri informasi?
2. Apakah kepemilikan instusional berpengaruh terhadap asimetri informasi?
3. Apakah audit tenur kantor akuntan publik dan kepemilikan institusional secara stimultan berpengaruh terhadap asimetri informasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh audit tenur Kantor Akuntan Publik terhadap asimetri informasi.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap asimetri informasi.
3. Untuk mengetahui pengaruh audit tenur kantor akuntan publik dan kepemilikan institusional secara stimultan terhadap asimetri informasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

1. Bagi perusahaan; menambah referenensi untuk pertimbangan kebijakan dalam masa tenur dengan auditor.
2. Bagi regulator; penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi mengenai seberapa lama aturan tenur audit perusahaan.
3. Bagi Investor; penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk investor terkait pemilihan investasi terhadap perusahaan dilihat dari tenur audit dengan Kantor Akuntan Publik.

1.4.2 Manfaat Teoritis

1. Bagi peneliti; menambah wawasan penulis terkait dengan audit tenur, kepemilikan institusional, dan asimetri informasi. Dan sebagai latihan pengaplikasian di lapangan atas teori-teori yang telah dipelajari selama proses perkuliahan.
2. Bagi peneliti selanjutnya; penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembandingan dari penelitian-penelitian sebelumnya dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.